

BAB VI

KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi dan pembahasan di bab sebelumnya. Penelitian ini menganalisis persepsi Penyelenggara pemilu dan Aktor politik terhadap sistem proposional terbuka dalam pemilu di Kabupaten Bantul. Dengan melihat pelanggaran pemilu yang cukup tinggi di Kabupaten Bantul.

Pelanggaran pemilu ini menjadi perdebatan yang serius terkait kerumitan pemilu, pelanggaran pemilu, dan kualitas masyarakat yang disebabkan oleh sistem pemilu yang digunakan saat ini. Sistem daftar terbuka menjadi perdebatan dibanyak ahli pemilu, akademisi, maupun praktisi politik. Banyak yang berpendapat sistem ini berdampak pada kesuburan praktik pragmatisme yang berdampak pada korupsi. Ada yang menganggap sistem ini berdampak pada kerumitan serta pelanggaran pemilu, serta ada yang mendukung sistem proposional daftar terbuka ini menjadi sistem yang harus dipertahankan dalam kondisi saat ini mengingat partai-partai politik belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

Penelitian ini melihat persepsi dari penyelenggara pemilu baik KPU Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten

Bantul serta aktor politik disetiap partai politik yang berkompetisi pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang atau individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan atau pesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.

Individu itu memprekdisikan suatu benda yang sama berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (*perceiver*) yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat pengalaman dan pengharapan individu. Kedua faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, sistem, ukuran latar belakang dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan / tempat kerja, dan keadaan sosial (Rivai, 2009:9)

6.1 Ringkasan Hasil

6.1.1. Pemahaman Aktor Politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap Dampak sistem proposional terbuka

Dari hasil wawancara serta analisis penulis dengan menggunakan *Artificial Intelligence* atau yang disebut aplikasi Nvivo 12 plus penyelenggara pemilu semua komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul beranggapan bahwa sistem proposional terbuka memiliki pemahaman berdampak negatif pada pemilu serentak 2019. Sedangkan KPU Bantul hampir sebagian menyatakan bahwa sistem proposional berdampak positif pada pemilu serentak, dalam perspektif aktor politik bervariasi ada 54% menyatakan bahwa berdampak negatif dan 48% beranggapan positif. Alasan-alasan pemahaman ini akan dibahas mendetail dalam penelitian ini dalam melihat Persepsi Aktor Politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap sistem proposional terbuka

Penelitian ini memberikan pandangan tiga perspektif lembaga yaitu Partai politik atau aktor politik, KPU Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul. Analisis kasus Pertama, yaitu aktor politik.

Alasan-alasan yang diungkapkan dalam pemahaman dampak sistem proposional terbuka berdampak buruk ialah yang paling mendasar sistem ini mengakibatkan diri kandidat menjadi pragmatis dikarenakan biaya politik mahal. Akar pragmatisme dalam masyarakat bisa dilacak dari kultur politik yang mencerminkan perilaku politik masyarakat. Pragmatisme muncul dalam masyarakat plural, yakni keanekaragaman yang jamak terjadi di Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika. Dalam masyarakat yang plural inilah pragmatisme tumbuh berkembang, sebab dalam masyarakat seperti ini, idealisme yang kolot atau terjerumus dalam perdebatan hanya akan menghambat tercapainya komitmen dan kepentingan umum. Semangat pragmatisme adalah bahwa kebenaran itu relatif, sesuai dengan konteks waktu, tempat, budaya, dan seterusnya.

Biaya politik yang tinggi ini aktor politik berpendapat bahwa sistem proposional terbuka menjadikan dilematis untuk melakukan praktik suap kepada konstituen. Karena apabila tidak melakukan bagi-bagi uang atau bentuk barang lainnya maka mereka dapat dipastikan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai masyarakat. Visi dan misi

tidak menjadi acuan masyarakat untuk memilih apalagi ideologi partai, namun karena mobilisasi uang menjadi takaran masyarakat dalam sistem proposional terbuka ini. Selanjutnya ialah berdampak pada proses kaderisasi internal partai yang terganggu, Dari hasil wawancara dan analisis temuan melalui aplikasi Nvivo 12 plus membuat partai-partai pemenang pemilu mengalami krisis ketersediaan kader handal. Ketika dihadapkan pada momentum Pemilu, mau tidak mau partai harus bersikap pragmatis dengan mengambil kandidat yang berasal dari luar partai. Alasannya, aktor tersebut mempunyai elektabilitas tinggi, ataupun kemampuan dana yang memadai.

Permasalahan kaderisasi partai politik yang ada korelasi hubungannya dengan sistem proposional daftar terbuka ialah kontrol partai menjadi lemah. Fenomena ini disebut Candidate-Centered Politics, kandidat calon menjadi aktor utama bukan partai. Partai hanya sebagai seperti kendaraan perahu politik bukan pengontrol kebijakan. Sistem daftar terbuka berdampak menjadikan pergeseran lain dalam kompetisi pemilu, dari party-centered politics menjadi candidate-centered politics. Pada situasi ini, menjadikan tarikan orientasi dalam kompetisi menempatkan faktor individu caleg

sebagai sentral dibandingkan partai politik. Kedua, Bawaslu Kabupaten Bantul memiliki pemahaman yang sama dengan Aktor politik 5 komisioner Bawaslu Bantul beranggapan bahwa sistem proposional daftar terbuka berdampak negatif pada pemilu di 2019. Alasan-alasan yang sering di munculkan Kerumitan pemilu yang cukup besar dan berimplikasi pada pelanggaran pemilu yang tinggi. Pelanggaran pemilu yang sering terjadi ialah praktik politik uang di masyarakat yang melibatkan unsur tokoh masyarakat paling bawah dan ini membentuk kualitas masyarakat menjadi buruk. Angka partisipasi masyarakat secara angka tinggi namun secara kualitas masih belum bisa dikatakan baik. Ketiga yaitu KPU Kabupaten Bantul berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten 5 komisioner beranggapan bahwa sistem proposional terbuka berdampak positif bagi iklim pemilu di Indonesia saat ini. Alasan-alasa yang sering muncul dari analisis penulis Proses rekrutmen yang tertutup menghasilkan kandidat yang korup, Pragmatisme partai politik, Kurangnya kedewasaan partai politik, Partisipasi pemilih masyarakat menjadi tinggi

Hasil temuan penelitian dari 26 responden. Responden yang mengatakan sistem proposional

terbuka berdampak negatif 22 Responden dan mengatakan bahwa sistem proposional terbuka berdampak positif 4 responden. Dengan ini bahwa persepsi responden sistem proposional terbuka mayoritas mengatakan berdampak negatif

6.1.2. Sikap Aktor politik dan Penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul terhadap Sistem proposional daftar terbuka

Dari data didapat dan dianalisis dengan aplikasi Nvivo 12 Plus ada perbedaan pandangan penyelenggara pemilu antara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bantul dan Badan pengawas pemilu Kabupaten Bantul dalam mengambil sikap pandangan terhadap sistem proposional terbuka. Sikap Komisi pemilihan umum (KPU) Bantul setuju bahwa sistem proposional terbuka masih relevan di gunakan di Indonesia, salah satu alasan yang mendasari ialah sistem ini memberikan transparansi informasi bagi pemilih terhadap calon legislatif di setiap dapil. Masyarakat dapat ikut mempengaruhi proses terpilihannya calon legislatif di setiap daerah masyarakat itu sendiri. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Bantul menyatakan sikap tidak setuju sistem proposional terbuka tetap digunakan dalam pemilu di Indonesia. Alasan utama yang

mendasari komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul ialah sistem proposional terbuka berdampak pada pelanggaran pemilu yang tinggi, timbulnya kualitas pemilih yang buruk akibat terjadinya pragmatisme kandidat dan pemilih.

Dari sisi Aktor politik sangat selaras dengan Bawaslu Kabupaten Bantul hampir mayoritas menyatakan sikap tidak setuju terhadap sistem proposional terbuka. Partai- partai besar mendominasi untuk menyatakan sikap tidak setuju alasan mereka sangat beragam atas ketidaksetujuan sistem proposional terbuka. Namun rata-rata dari partai politik menjelaskan bahwa sistem proposional terbuka berdampak pada biaya politik yang tinggi. Persaingan di internal partai dan eksternal partai di identikan dengan biaya politik yang tinggi. Tentunya pola kampanye akan berubah dibebankan kepada personal caleg.

Biaya politik yang tinggi ini juga salah satunya faktor praktik politik uang, praktik politik uang ini dilakukan hampir semua partai politik mengatakan karena faktor terpaksa untuk melakukan itu. Disisi lain masyarakat secara umum meminta imbalan pada para caleg apabila akan terpilih atau masuk ke wilayah

warga untuk bersosialisasi visi dan misi. Faktor ini menjadi dilematis yang diakui oleh para partai politik apabila tidak memberikan uang atau barang akan berefek kepada kekalahan dan apabila ada yang melakukan satu saja praktik politik uang yang lain tidak maka suara tersebut akan beralih kepada orang lain.

Dalam analisis penulis melihat para kandidat/calon legislatif memiliki kecenderungan untuk bersaing secara lebih di internal partai politik yang dimana ini juga mengakibatkan ongkos politik yang cukup tinggi. proporsional terbuka, caleg memiliki insentif untuk mengalahkan teman separtainya daripada menghabiskan energi untuk bertarung melawan caleg dari partai politik lain. Entah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya atau pertimbangan lain, caleg pada umumnya bisa menebak berapa kursi yang akan dimenangkan partainya. Namun, terutama di dapil yang tak ada caleg favorit, mereka umumnya belum tahu pasti siapa di antara caleg dalam satu partai politik yang akan memenangi kursi tersebut. Karena itu, setiap caleg akan memetakan seberapa ketat pertarungan di dapil dan di internal partainya, berapa banyak suara personal (personal vote) yang mereka perlukan untuk mengalahkan rival separtai, dan lain-lain. Dalam

konteks ketidakpastian tinggi siapa di antara para caleg yang lolos dalam satu partai inilah politik uang menjadi jalan keluar strategi untuk memenangi kontestasi elektoral.

Namun ada beberapa Partai seperti PBB, Perindo, PSI, setuju sistem proposional terbuka tetap menjadi sistem terbaik dalam pemilu di Indonesia disebabkan partai kecil memiliki optimistis mendapatkan suara dengan mengandalkan popularitas personal karena belum adanya basis masa yang pasti dan selanjutnya kader-kader yang tidak masuk dalam kepengurusan partai politik memiliki kesempatan untuk terpilih duduk di DPRD

Hasil temuan penelitian dari 26 responden. Responden yang menyatakan sikap tidak setuju dengan sistem proposional terbuka 22 Responden dan mengatakan setuju bahwa sistem proposional terbuka tetap dipertahankan 4 responden. Dengan ini bahwa sikap responden sistem proposional terbuka mayoritas mengatakan tidak setuju sistem proposional terbuka tetap di pertahankan.

6.1.3. Tindakan Aktor politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap sistem proposional terbuka

mayoritas partai politik mengkritik dan mengevaluasi sistem pemilu melalui instrumen evaluasi pemilu yang dilakukan oleh internal partai politik dan juga yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Alasan-alasan mereka yang paling dominan ialah tindakan dalam mengkritik melalui instrumen evaluasi pemilu harapannya dapat berefek pada pembentukan opini publik bahwa sistem proposional terbuka justru mengakibatkan banyak masalah.

Selanjutnya sebagian yang menyatakan setuju terhadap sistem daftar terbuka juga memberikan dukungan dengan cara memberikan masukan memperkuat sistem proposional terbuka melalui instrumen dukungan di evaluasi pemilu. yang harapannya ada perbaikan-perbaikan kekurangan pemilu namun tidak merubah sistem pemilu menjadi tertutup karena akan berdampak pada masalah yang besar.

6.2. Rekomendasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis menawarkan sebuah opsi tawaran sistem campuran. Sistem campuran adalah menggabungkan sistem proposional dengan sistem mayoritas. Cara penerapan sebagian sebagian anggota parlemen dipilih melalui sistem mayoritas (varian first past the post), sebagian dipilih berdasarkan sistem proposional di mana keterpilihan calon ditentukan berdasarkan nomor urut yang disusun partai politik dalam satu daftar list surat suara. Bagi kandidat yang memiliki ekonomi yang kuat dan popularitas yang tinggi dapat mengikuti kompetisi dengan masuk dengan varian mayoritas masyarakat dapat memilih secara langsung sedangkan kandidat yang tidak memiliki ekonomi yang kuat namun memiliki kapasitas yang baik dan melalui proses pengkaderan partai yang riigid dapat masuk dalam sistem proposional dengan urutan nomor ditentukan oleh partai. Partai dapat melakukan mekanisme seleksi khusus bagi kaderisasi partai dan memiliki kontrol langsung kepada kandidat. Sistem ini dapat mengurangi pragmatisme politik antara kandidat dan konstituen dan mendorong partai politik untuk memperkuat mekanisme seleksi di internal partai dengan menjual ideologi partai tidak lagi terhadi dilema untuk mencari kandidat yang memiliki ekonomi yang cukup namun kapasitas yang mumpuni

untuk menjadi wakil rakyat. Sistem ini terbukti sangat efektif digunakan di Norwegia, Selandia Baru, dan Jerman.

Selanjutnya opsi sistem proposional tertutup juga bisa menjadi opsi kedua. Sistem proposional tertutup dimana pemilih diberikan pilihan hanya memilih partai politik dan partai politik berhak menentukan nomor urut kandidat. Opsi ini tentu akan meringankan beban teknis penyelenggaraan pemilu. Beban penyelenggara pemilu semakin ringan dibandingkan sistem proposional terbuka. Namun opsi ini tentunya dengan catatan khusus bahwa partai politik harus mampu transparan dan terbuka dalam rekrutmen seleksi kandidat.